

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Problematika

Problematika merupakan istilah yang berasal dari bahasa Inggris yakni *problem* yang artinya soal, masalah, atau halangan. Selanjutnya kata tersebut di adopsi dalam bahasa Indonesia yakni dengan kata *problematika* yang memiliki arti masalah atau perkara sulit yang terjadi pada suatu proses. Selain itu *problematika* dapat diartikan sebagai suatu jamak dari penggunaan kata *problematika* yaitu masalah atau sebuah kesulitan.¹⁷

Sedangkan menurut Suharso, *problematika* adalah sesuatu yang mengandung masalah. permasalahan dapat diartikan juga sebagai sesuatu yang menghalangi tercapainya sebuah tujuan.¹⁸

Adapun menurut Miss Bismee Chamaeng *problematika* pembelajaran merupakan berbagai permasalahan yang mengganggu, menghambat, mempersulit, atau bahkan mengakibatkan kegagalan dalam mencapai tujuan pembelajaran.¹⁹

Berdasarkan beberapa definisi yang telah dipaparkan di atas maka, *problematika* dapat diartikan sebagai permasalahan yang terjadi pada sebuah proses dan dapat menghambat atau mempersulit tercapainya suatu tujuan dengan baik. Dalam hal ini tujuan yang dimaksud adalah tujuan dari pembelajaran yang sesuai dengan kurikulum pendidikan.

¹⁷ Izzul fattawi, "Problematika Pendidikan Islam Modern", Vol. 8, No. 2, (2015), hlm. 269.

¹⁸ Suharso, dkk, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Widiya Karya, 2009), h. 391.

¹⁹ Miss Bismee Chamaeng, *Problematika Pembelajaran*, (Yogyakarta: Cahaya Ilmu, 2011), h. 20.

Adapun problematika pada lingkup yang peneliti kaji berkaitan dengan problematika dalam dunia pendidikan. Beberapa problematika kaitannya yang dapat terjadi dalam dunia pendidikan yakni pendidikan di Indonesia masih disesuaikan dengan keadaan dan kepentingan penguasa, sehingga pendidikan akan diarahkan sesuai keperluan politik. Sejak Indonesia merdeka hingga saat ini dunia pendidikan telah banyak mengalami perubahan atau pergantian kurikulum dalam pendidikan.²⁰ Selain itu di Indonesia pendidikan masih tergolong menunjukkan kualitas pendidikan yang rendah. Terdapat banyak hal yang menjadi faktor kualitas pendidikan yang rendah di Indonesia, salah satu diantaranya sarana prasarana yang belum memadai, sumber daya manusia atau pendidik yang masih tergolong kurang memiliki kualitas untuk berperan secara profesional sepenuhnya, selain itu kesenjangan pendidikan bisa terjadi sebab lingkungan seperti pendidikan di kota dan di daerah terpencil sudah berbeda meski pada dasarnya menggunakan metode atau model pembelajaran serta penerapan kurikulum yang sama.²¹

Dari beberapa penjelasan yang berkaitan dengan problematika dalam dunia pendidikan diatas maka, problematika dapat diartikan sebagai permasalahan-permasalahan atau halangan yang terjadi dalam proses pelaksanaan pendidikan di Indonesia, lebih tepatnya pada penelitian ini yakni proses pelaksanaan kurikulum merdeka di MAN 2 Nganjuk.

²⁰ Efrizal Nasution, "Problematika Pendidikan di Indonesia", *Jurnal Fakultas Ushuluddin dan Dakwah IAIN Ambon*, (2016), hlm. 6.

²¹ Efrizal Nasution, "Problematika Pendidikan di Indonesia", *Jurnal Fakultas Ushuluddin dan Dakwah IAIN Ambon*, (2016), hlm. 7.

B. Implementasi

Implementasi berasal dari bahasa Inggris *to implement* yang artinya mengimplementasikan. Jadi implementasi tidak hanya suatu aktivitas, tetapi sesuatu kegiatan yang direncanakan dan dilakukan dengan serius serta berpacu pada norma-norma tertentu untuk mencapai tujuan dari kegiatan tersebut. Adapun Implementasi pada Kamus Besar Bahasa Indonesia artinya pelaksanaan/penerapan.²²

Terdapat beberapa pendapat para ahli mengenai pengertian implementasi. Sedangkan implementasi menurut para ahli yaitu Menurut Usman, Implementasi merupakan aktivitas, aksi, tindakan, atau suatu kegiatan terencana dan untuk mencapai tujuan dari kegiatan tersebut. Menurut Widodo implementasi artinya menyediakan sarana untuk melaksanakan suatu kebijakan dan dapat menimbulkan dampak/akibat terhadap sesuatu.²³ Menurut Nana Sudjana implementasi adalah upaya pemimpin dengan menumbuhkan dorongan atau motivasi dalam diri mereka untuk melaksanakan kegiatan yang diberikan sesuai rencana dan selanjutnya dilaksanakan dengan mekanisme tertentu.²⁴

Dari uraian implementasi di atas maka, implementasi bisa diartikan sebagai pelaksanaan dengan melalui aktivitas yang harus menyesuaikan proses interaksi diantara tujuan dan tindakan untuk mencapainya. Dalam hal ini implementasi menjadi aspek penting untuk keseluruhan proses kebijakan serta

²²Unang Wahidin, Muhammad Sarbini, Ali Maulida, Miftah Wangsadanureja, "Implementasi Pembelajaran Agama Islam Berbasis Multimedia Di Pondok Pesantren", *Edukasi Islami: Jurnal Pendidikan Islam*, Vol. 10, No.1, (2021), hlm. 23.

²³ Ali Miftakhu Rosad, "Implementasi Pendidikan Karakter melalui Kegiatan Pembelajaran di Lingkungan Sekolah", *Tarbawi: jurnal Keilmuan Manajemen Pendidikan*, Vol. 5, No. 2, (2019), hlm. 175.

²⁴ Nana Sudjana, *Dasar-Dasar proses Belajar Mengajar*, (Bandung: Sinar Baru, 2009), h. 20.

suatu upaya untuk mencapai tujuan tertentu dengan menggunakan sarana prasarana dalam urutan waktu tertentu.

Pada kenyataannya implementasi kurikulum menurut Fullan adalah proses untuk melaksanakan ide, program, dengan harapan dapat diterima dan menjadikan suatu perubahan.²⁵

C. Kurikulum Merdeka

1. Pengertian Kurikulum

Salah satu komponen penting dalam pendidikan adalah kurikulum, yakni untuk melaksanakan proses pembelajaran. Sebab, kurikulum sebagai cara mendeskripsikan visi, misi dan tujuan pendidikan pada sebuah lembaga atau institusi pendidikan. Selain itu kurikulum dapat diartikan sebagai sentral muatan nilai yang akan ditransformasikan kepada peserta didik untuk mencapai tujuan pendidikan.²⁶ Terdapat banyak definisi kurikulum menurut para ahli, dalam perbedaan ini dapat disebabkan karena prespektif yang berbeda dalam memaknai kurikulum dengan tetap pada koridor kebenaran. Salah satu pengertian kurikulum menurut para ahli yakni Nana Sudjana bahwa kurikulum adalah niat dan harapan yang wujudkan dalam bentuk perencanaan atau program pendidikan yang dilakukan oleh para pendidik. Kurikulum juga dapat dikatakan sebagai niat dan rencana sedangkan pelaksanaannya melalui proses pembelajaran yang didalamnya adalah pendidik dan peserta didik.²⁷ Selain itu pemaknaan kurikulum senantiasa

²⁵ Eka Syafriyanto, "Implementasi Pembelajaran Pendidikan Gama Islam Berwawasan Rekonstruksi Sosial", *Al-Tadzkiyyah: Jurnal Pendidikan Islam*, Vol. 6, (2015), hlm. 217.

²⁶ Khoirurrijal, Fadriati, dkk, *Pengembangan Kurikulum Merdeka*, (Malang: CV Literasi Nusantara Abadi, 2022), h. 1.

²⁷ Nurul Hikmah, *Kurikulum Merdeka Pendidikan Islam Anak Usia Dini*, (Tangerang: Bait Qur'any Multimedia, 2022), h. 36.

mengalami perkembangan sesuai dengan alur perubahan zaman supaya sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Kurikulum secara *etimologis* berasal dari bahasa Yunani yakni *curir* artinya pelari dan *curare* artinya tempat berpacu. Jadi kurikulum ini berasal dari dunia olahraga pada masa Romawi Kuno di Yunani, yang mengandung pengertian sebagai jarak yang harus ditempuh oleh pelari dari garis *start* hingga *finish*.²⁸ Adapun kurikulum dalam kosa kata Arab, merupakan istilah yang dikenal dengan *manhaj atta'limi* yang berarti jalan yang terang atau jalan terang yang dilalui oleh manusia pada berbagai kehidupannya.²⁹ Selain itu dalam pengertian klasik, kurikulum sebagai rencana pelajaran dalam lembaga pendidikan. Secara lebih jauh kurikulum diartikan dalam beberapa macam, diantaranya: sebagai rencana pengajaran, sebagai rencana belajar peserta didik, sebagai pengalaman belajar yang diperoleh peserta didik dari sekolah atau madrasah. Oleh karenanya kurikulum dapat digambarkan sebagai bahan tertulis yang dimaksudkan untuk digunakan pendidik untuk melakukan pembelajaran kepada peserta didik. Adapun pandangan modern mengenai kurikulum yang dijelaskan oleh Hamid Hasan dalam buku Pengembangan Kurikulum Baru oleh Sholeh Hidayat bahwa, konsep kurikulum dapat ditinjau dalam empat dimensi:³⁰

a. Kurikulum sebagai suatu ide, dihasilkan melalui teori dan penelitian, terkhusus dalam bidang kurikulum dan pendidikan.

²⁸ Hasan langgulung, *Manusia dan Pendidikan suatu Analisis Psikologi Pendidikan*, (Jakarta: Pustaka Al-Husna Baru, 2004) , h. 176.

²⁹ Omar Muhammad Al-Toumy Al-Syaibani, *Falsafah Pendidikan Islam* (Jakarta: Bulan Bintang, 1997), h. 43.

³⁰ Sholeh Hidayat, *Pengembangan Kurikulum Baru*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2017), h 20.

- b. Kurikulum sebagai suatu rencana tertulis, merupakan bentuk perwujudan dari kurikulum sebagai suatu ide yang memuat tentang tujuan, bahan, kegiatan, alat-alat, dan waktu.
- c. Kurikulum sebagai suatu kegiatan, merupakan pelaksanaan dari kurikulum sebagai suatu rencana tertulis dalam bentuk praktek pembelajaran.
- d. Kurikulum sebagai suatu hasil, merupakan konsekuensi dari kurikulum sebagai suatu kegiatan dalam tercapainya perubahan perilaku atau kemampuan tertentu peserta didik.³¹

Dari beberapa penjelasan di atas mengenai pengertian kurikulum, maka kurikulum merupakan suatu ide yang direncanakan baik secara tertulis dan tidak tertulis. Adapun secara tertulis berisi tujuan, bahan, kegiatan, alat dan waktu yang akan dilaksanakan dalam bentuk kegiatan terstruktur dan memberikan hasil dengan tercapainya perubahan perilaku atau kemampuan peserta didik sesuai tujuan pendidikan.

2. Komponen Kurikulum

Bagi para pengembang kurikulum termasuk guru perlu memperhatikan dasar kurikulum dengan pendekatan sistem, yakni kurikulum yang memiliki komponen-komponen pokok kurikulum baik pada tingkat makro (nasional), institusi (lembaga), mata pelajaran ataupun pada tingkat program pembelajaran untuk mengetahui keefektifan kurikulum dan tingkat penguasaan peserta didik pada materi yang disampaikan. Sehingga

³¹ Sholeh Hidayat, *Pengembangan Kurikulum Baru*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2017), h. 22.

untuk memenuhi kriteria kurikulum, berikut beberapa pokok komponen kurikulum:

a. Komponen Tujuan

Dalam dunia pendidikan tujuan merupakan suatu hal krusial, tanpa adanya tujuan maka perencanaan hingga proses pelaksanaan tidak akan tercapai. Untuk itu tujuan menjadi suatu pencapaian untuk mencegah penyimpangan dari tujuan itu sendiri. Adapaun tujuan memiliki dua fungsi yakni memberi arah dan merupakan suatu yang akan dicapai oleh kegiatan pendidikan. Sehingga tujuan dari kurikulum ini dirumuskan langsung oleh pemerintah melalui tujuan pendidikan nasional sebagai pedoman bagi pengembangan tujuan tujuan pendidikan yang lebih khusus.

b. Komponen Isi/ Materi

Isi/materi kurikulum pada dasarnya adalah semua kegiatan dan pengalaman yang dikembangkan dan disusun dalam rangka mencapai tujuan pendidikan. Selanjutnya isi kurikulum dikelompokkan menjadi tiga bagian yakni: a) logika, pengetahuan tentang benar dan salah berdasarkan prosedur keilmuan, b) etika, yakni pengetahuan mengenai baik buruk, nilai dan moral, c) estetika, berupa pengetahuan tentang indah jelek, yang memiliki nilai seni. Dengan adanya pengelompokan tersebut pengembangan isi pada kurikulum harus disusun berdasarkan beberapa prinsip sebagai berikut: a) mengandung bahan kajian atau topik untuk dipelajari peserta didik dalam proses pembelajaran, b) berorientasi

pada standar kompetensi lulusan, standar kompetensi pelajaran dan capaian pembelajaran yang telah ditentukan.

c. Komponen Proses

Pada komponen proses harus menunjukkan adanya kegiatan pembelajaran, yakni upaya yang dilakukan pendidik pada proses pembelajaran bersama peserta didik. Sehingga pada komponen proses pendidik dituntut mampu memenuhi kriteria yang telah ditetapkan. Adapun kriteria yang dapat dilakukan salah satunya menggunakan beberapa strategi saat mengajar untuk menyampaikan isi kurikulum, diantaranya: a) strategi ekspositori klasikal, b) strategi pembelajaran *heuristic (discovery dan inquiry)*, c) strategi kelompok kecil, dan d) strategi pembelajaran individual. Disamping strategi terdapat juga metode yang digunakan dalam pembelajaran. Dalam kegiatan pembelajaran pendidik juga harus mampu mengoperasikan media, baik media visual, audio, audio-visual dan lain-lain serta sumber belajar sebagai pedoman pendidik dalam mengajar.

d. Komponen Evaluasi

Untuk mengetahui efektivitas dan upaya memperbaiki maka evaluasi kurikulum menjadi komponen penting yang diperlukan. Perlu ahli khusus yang memiliki pengetahuan mengenai kurikulum untuk melakukan evaluasi kurikulum sebab untuk mengevaluasi kurikulum merupakan hal yang sulit dan kompleks serta terdapat banyak aspek yang harus diperhatikan.³²

³² Zainal Arifin, *Konsep dan Model Pengembangan Kurikulum*, (Bandung: PT. Rosdakarya, 2017), h. 79.

3. Fungsi Kurikulum

Secara umum fungsi dari kurikulum adalah sebagai alat untuk membantu proses pembelajaran dan menjadi aspek yang mempengaruhi peserta didik di sekolah, pendidik dan sarana prasarana. Sehingga dalam penyusunannya kurikulum sebagai program belajar harus disusun secara sistematis dan logis, oleh karena itu fungsi dalam kurikulum akan memudahkan pendidikan dalam mencapai tujuan pembelajaran, berdasarkan fungsi kurikulum tersebut fungsi kurikulum menurut Alexander Inglis, dalam buku ajar kurikulum bahan dan media pembelajaran PLS oleh Umyssalam A.T.A Duludu,³³ sebagai berikut:

a. Fungsi penyesuaian (*The Adjustive Or Adaptive Function*)

Kurikulum sebagai alat pendidikan harus mampu membantu atau mengarahkan peserta didik untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan, baik lingkungan fisik maupun lingkungan sosial.

b. Fungsi integrasi (*The Integrating Function*)

Kurikulum sebagai alat pendidikan harus bisa mengembangkan pribadi peserta didik secara utuh, yakni mulai dari kemampuan kognitif, afektif, psikomotor, dan ketiga kemampuan dalam diri peserta didik harus berkembang secara terintegrasi.

c. Fungsi diferensiasi (*The Differentiating Function*)

Kurikulum sebagai alat pendidikan harus mampu memberikan pelayanan terhadap perbedaan di antara setiap individu peserta didik, sebab pada dasarnya perbedaan atau diferensiasi akan mendorong

³³ Umyssalam A.T.A. Duludu, *Kurikulum Bahan dan Media Pembelajaran PLS*, (Yogyakarta: Deepublish, 2017), h. 5.

individu berfikir kritis dan kreatif. Sehingga dapat mendorong kemajuan sosial dalam kehidupan bermasyarakat dan menghindarkan masyarakat dari stagnasi sosial.

d. Fungsi persiapan (*The propaedeutic function*)

Kurikulum sebagai alat pendidikan memiliki fungsi untuk mempersiapkan peserta didik agar mampu melanjutkan pendidikan pada jenjang yang lebih tinggi, seperti melanjutkan studi ke perguruan tinggi atau persiapan belajar dalam masyarakat. Sehingga persiapan dalam kemampuan untuk belajar pada jenjang lebih tinggi di perlukan peserta didik.

e. Fungsi pemilihan (*The Selective Function*)

Kurikulum sebagai alat pendidikan harus mampu memberikan kesempatan untuk peserta didik memilih program-program belajar atau minat dan bakat yang sesuai dengan kemampuan dan bakat mereka. Fungsi pemilihan ini berkaitan dengan fungsi diferensiasi sebab adanya perbedaan individu peserta didik berarti terdapat kesempatan bagi peserta didik untuk memilih apa yang sesuai dengan minat dan kemampuan yang dimiliki.

f. Fungsi diagnostic (*The Diagnostic Function*)

Kurikulum sebagai alat pendidikan dalam fungsi diagnostik yakni kurikulum harus mampu membantu dan mengarahkan peserta didik untuk mampu memahami dan menerima potensi dan kelemahan yang mereka miliki, oleh karena itu peserta didik diharapkan dapat

mengembangkan secara mandiri potensi yang mereka miliki atau memperbaiki kelemahan-kelemahan yang ada pada dirinya.³⁴

4. Pengertian Kurikulum Merdeka

Kurikulum Merdeka merupakan kurikulum yang mulai diberlakukan tahun 2022. Menarik garis sejarah terjadinya pergantian kurikulum 2013 menjadi kurikulum merdeka adalah ketika Indonesia mengalami Pandemi Covid 19 yang memberi dampak di berbagai sektor, salah satunya adalah dalam sektor bidang pendidikan. Pada masa pandemi tersebut terdapat kondisi yang menyebabkan ketertinggalan pembelajaran (*learning loss*) yang berbeda-beda pada ketercapaian kompetensi peserta didik. Selain itu dalam buku Pengembangan Kurikulum Merdeka dikatakan “banyak studi nasional maupun internasional yang menyebutkan bahwa Indonesia juga telah lama mengalami krisis pembelajaran (*learning loss*)”³⁵ Studi tersebut menemukan bahwa banyak peserta didik di Indonesia masih kesulitan memahami bacaan sederhana ataupun menerapkan konsep Matematika Dasar, selain itu terdapat juga adanya kesenjangan pendidikan yang cukup tinggi antar wilayah dan kelompok sosial di Indonesia. Dengan kondisi tersebut, Kemendikbudristek mencoba untuk berupaya memulihkan pembelajaran dengan salah satu upayanya adalah mencanangkan Kurikulum Merdeka.

Kurikulum Merdeka merupakan kurikulum dengan pembelajaran intrakurikuler yang beragam, konten yang lebih optimal agar peserta didik memiliki cukup waktu untuk mendalami konsep dan menguatkan

³⁴ Sarinah, *Pengantar Kurikulum*, (Yogyakarta: Deepublish, 2015), h. 18.

³⁵ Khoirurrijal, dkk, *Pengembangan Kurikulum Merdeka*, (Malang: CV. Literasi Nusantara Abadi, 2022), h.5.

kompetensi. Pendidik juga leluasa untuk memilih berbagai perangkat ajar sehingga pembelajaran dapat disesuaikan dengan kebutuhan belajar dan minat peserta didik. Kebijakan mengenai Kurikulum Merdeka dilaksanakan untuk percepatan mencapai tujuan nasional pendidikan, yakni meningkatkan kualitas sumber daya manusia di Indonesia. Selain itu kebijakan merdeka belajar ini dilaksanakan dengan tiga alasan, yakni:

- a. Peraturan pendidikan selama ini umumnya bersifat kaku dan mengikat seperti peraturan UN (Ujian Nasional), RPP (Rencana Pelaksanaan Pembelajaran), penggunaan dana BOS (Bantuan Operasional Sekolah) dan lain lain yang terbukti tidak efektif untuk mencapai tujuan nasional pendidikan.
- b. Tidak efektifnya pencapaian tujuan nasional pendidikan terbukti pada hasil belajar peserta didik di komparasi tes internasional. Artinya menunjukkan bahwa peserta didik masih lemah dalam aspek penalarana tingkat tinggi, terkhusus pada literasi dan numerasi.
- c. Kebijakan merdeka belajar yang tidak bersifat kaku dan mengikat diharapkan dapat mengatasi keragaman kondisi, tantangan, dan permasalahan pendidikan yang berbeda setiap lembaga sekolah. Sehingga dapat dilakukan dengan strategi berbeda sesuai masalah yang ada.³⁶

Pada penerapan kurikulum merdeka pendidik dapat memilih berbagai metode pengajaran yang digunakan untuk mengajar peserta didik sesuai kebutuhan mereka. Selain itu kurikulum ini dimaksudkan lebih

³⁶ Khoirurrijal, dkk, Pengembangan Kurikulum Merdeka, (Malang: CV. Literasi Nusantara Abadi, 2022), h. 5.

berfokus untuk mendorong pencapaian profil pelajar Pancasila yang ditetapkan pemerintah. Tentunya terdapat beberapa perbedaan dalam proses penerapan antara Kurikulum 2013 dan Kurikulum Merdeka. Terdapat empat pokok kebijakan pada kurikulum merdeka yakni:

- a. Mengganti USBN (Ujian Sekolah Berstandar Nasional) menjadi asesmen kompetensi, dimaksudkan untuk mengembalikan keleluasaan sekolah untuk menentukan kelulusan sesuai undang-undang Sisdiknas.
- b. Mengganti UN (Ujian Nasional) menjadi asesmen Kompetensi Minimum dan Survei Karakter, dimaksudkan untuk mengurangi tekanan pada pendidik, siswa, dan orang tua, serta dianggap tidak optimal sebagai alat untuk memperbaiki mutu pendidikan nasional.
- c. Perampingan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) menjadi ATP (Alur Tujuan Pembelajaran), perampingan ini dimaksudkan untuk mengoptimalkan performance pendidik karena RPP (Rencana Pelaksanaan Pembelajaran) terlalu banyak komponen jika ditulis dan bisa mencapai 20 halaman. Sehingga saat ini RPP (Rencana Pelaksanaan Pembelajaran) menjadi ATP (Alur Tujuan Pembelajaran) dan cukup satu halaman saja.
- d. Peraturan penerimaan peserta didik baru Zonasi, pada peraturan sistem zonasi dibuat lebih fleksibel, dengan beberapa perincian peraturan sistem zonasi yang sebelumnya dibagi menjadi tiga bagian jalur zonasi, prestasi, perpindahan, kemudian dirubah menjadi empat bagian yakni jalur

zonasi, jalur afirmasi, jalur perpindahan, dan jalur prestasi, dengan masing masing persensi yang berbeda.³⁷

Selain dari empat kebijakan di atas, terdapat beberapa perubahan dalam komponen kurikulum dari kurikulum 2013 menjadi Kurikulum Merdeka sebagaimana yang telah Kemendikbud katakana bahwa Kurikulum merdeka berfokus pada materi esensial dan pengembangan kompetensi peserta pada fasenya, sehingga peserta didik dapat belajar lebih mendalam, bermakna, dan menyenangkan. Pembelajaran akan jauh lebih relevan dan interaktif melalui kegiatan proyek sebab akan memberikan peluang lebih luas pada peserta didik untuk lebih kreatif dan aktif dalam mengeksplorasi diri mereka terhadap isu-isu aktual seperti lingkungan, kesehatan dan lain lain untuk mendukung pengembangan karakter dan kompetensi Profil Pelajar Pancasila. Terdapat beberapa karakteristik pada kurikulum merdeka diantaranya:³⁸

- a. Pembelajaran berbasis proyek guna mengembangkan *soft skill* dan karakter sesuai Profil Pelajar Pancasila
- b. Fokus pada materi esensial sehingga terdapat waktu untuk pembelajaran secara mendalam bagi kompetensi dasar diantaranya literasi dan numerasi
- c. Fleksibilitas pendidik untuk melaksanakan pembelajaran yang terdiferensiasi sesuai kemampuan peserta didik

³⁷ Rendika Vhalery, Albertus Maria Setyastanto, Ari Wahyu Leksono, "Kurikulum Merdeka Belajar Kampus Merdeka: Sebuah Kajian Literatur", *Research and Development Journal Of Education*, Vol. 8, No.1, (2022), hlm. 188

³⁸ Direktorat KSKK Madrasah, Dikrektorat Jenderal Pendidikan Kementerian Agama RI, *Panduan Implementasi Kurikulum Merdeka Pada Madrasah*, (Jakarta: 2022), h. 4

Berdasarkan penjabaran di atas bahwa kurikulum diharapkan dapat mengembangkan *soft skill* dan karakter siswa dengan adanya program Profil Pelajar Pancasila yakni berakhlak mulia, berkebinekaan global, mandiri, bergotong royong, bernalar kritis, dan kreatif. Selain itu juga kurikulum merdeka lebih fokus pada materi penting sehingga suatu pendidikan dalam hal ini sebagai pendidik mendapat kebebasan untuk memberikan materi pembelajaran yang lebih mendalam tentang kompetensi dasar yakni literasi dan numerasi. Sehingga guru lebih fleksibel untuk melakukan pembelajaran sesuai dengan kemampuan peserta didik masing-masing. Dikutip dari buku saku Tanya Jawab Kurikulum Merdeka bahwa keunggulan dari kurikulum merdeka antara lain:³⁹

- a. Materi lebih sederhana, mendalam, dan fokus pada materi yang esensial.
- b. Lebih merdeka sebab guru memiliki keleluasaan untuk mengajar setiap tahap capaian perkembangan peserta didik. Selain itu sekolah juga memiliki kebebasan atau kewenangan untuk mengembangkan kurikulum sesuai dengan satuan pendidikan dan peserta didik.
- c. Lebih relevan dan interaktif dimana pembelajaran melalui kegiatan proyek yang memberi kesempatan untuk peserta didik untuk lebih aktif fan mengeksplorasi diri dengan isu-isu aktual.

Dari beberapa pemaparan konsep kebijakan kurikulum merdeka belajar yang dicanangkan oleh Menteri Pendidikan Nadiem Makarim diatas terdapat kesejajaran dengan konsep pendidikan menurut John Dewey yakni aliran filsafat progresivisme. Konsep tersebut sama-sama menekankan

³⁹ Kemendikbud, *Buku Saku Tanya Jawab Kurikulum Merdeka*, (Jakarta: 2022)h. 21

kemerdekaan atau keleluasaan lembaga pendidikan dalam mengeksplorasi secara maksimal kemampuan dan potensi yang dimiliki peserta didik. Dalam hal ini konsep aliran John Dewey yakni aliran progresivisme dapat dimaknai sebagai gerakan perubahan menuju perbaikan. Maksudnya adalah aliran progresivisme adalah aliran filsafat yang menghendaki suatu kemajuan yang akan membawa perubahan. progresivisme merupakan suatu gerakan dalam bidang pendidikan dimana aliran ini menekankan pada konsep progress yang menyatakan bahwa manusia memiliki kemampuan untuk mengembangkan dan menyempurnakan lingkungannya dengan kecerdasan yang dimiliki dan metode ilmiah guna menyelesaikan permasalahan yang muncul baik dalam kehidupan individu ataupun kehidupan sosial. Dalam hal ini pendidikan akan berhasil jika mampu melibatkan secara aktif peserta didik dalam pembelajaran sehingga mereka mendapatkan banyak pengalaman untuk bekal hidupnya. Selain itu progresivisme tidak hanya sekedar berupaya memberikan pengetahuan pada peserta didik tetapi juga memberi ragam aktivitas yang mengarah pada pelatihan kemampuan berpikir secara menyeluruh. Adapun hubungannya dengan penerapan kurikulum merdeka terdapat pada kegiatan P5 (Proyek Penguat Profil Pelajar Pancasila) sebagai kegiatan untuk mengembangkan karakter peserta didik sesuai dengan nilai nilai pancasila.⁴⁰

Dari penjabaran Kurikulum Merdeka tersebut, pada penerapannya di MAN 2 Nganjuk berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan peneliti, masih terdapat beberapa kendala yang dihadapi madrasah dalam

⁴⁰ Ahmad Shodik, "Merdeka Belajar: menurut prepektif John Dewey", *Jurnal Ilmu-ilmu Sejarah, Sosial, Budaya, dan Kependidikan*, Vol. 8, No. 2, (2021), hlm. 213

penerapan kurikulum merdeka.terlebih pada mata pelajaran Agama diantaranya mata pelajaran Fikih, Al Qur'an Hadist, Akidah Akhlak dan Sejarah Kebudayaan Islam sehingga, menarik peneliti untuk melaksanakan penelitian mengenai problematika implementasi Kurikulum Merdeka pada mata pelajaran Pendidikan Agama di MAN 2 Nganjuk kelas X (sepuluh) tahun pelajaran 2022/2023.

5. Regulasi Implementasi Kurikulum Merdeka di Madrasah

Sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan kualitas dalam dunia pendidikan, maka pemerintah berupaya membuat kebijakan yang diperlukan. Dalam hal ini, Kementerian Agama sebagai lembaga yang menaungi Madrasah menetapkan pelaksanaan kurikulum merdeka tahun pelajaran 2022/2023 melalui Surat Keputusan Dirijen Pendidikan Islam Nomor 3811 Tahun 2022. Seluruh madrasah yang menerapkan kurikulum merdeka secara bertahap mulai tahun pelajaran 2022/2023 yaitu mulai dari Raudhatul Atfal (RA), Madrasah Ibtidaiyah (MI) pada kelas 1 dan 4, Madrasah Tsanawiyah (MTs) pada kelas 7, dan Madrasah Aliyah (MA) pada kelas 10.

Untuk tahap pertama madrasah yang ditetapkan sebagai lembaga yang menerapkan kurikulum merdeka sesuai dengan SK (Surat Keterangan) Dirijen Pendidikan Islam nomor 3811 tahun 2022 tersebutkan bahwa seluruh madrasah pada setiap jenjang telah terdaftar 2.471 baik negeri maupun swasta.⁴¹

⁴¹ Taqjudin Zarkasi, Muslihatun, Masriatul Fajri, "Madrasah Dalam Platform Kurikulum Merdeka Belajar", *Jurnal Gema Nurani Guru*, Vol. 1, No. 2, (2022), hlm. 75.

Adapun regulasi kurikulum merdeka di madrasah sebagaimana keputusan Menteri Agama Republik Indonesia nomor 347 tahun 2022 terdapat beberapa kebijakan kurikulum merdeka pada lembaga madrasah, diantaranya:⁴²

a. Proyek penguatan Profil Pelajar Pancasila pada madrasah

Proyek penguatan profil pelajar pancasila pada madrasah diproyeksikan menjadi dua aspek yakni Profil Pelajar Pancasila dan Profil Pelajar *Ramatan Lil Alamin*, dimana proyek penguatan profil pelajar pancasila ini merupakan kegiatan kokurikuler yang berbasis proyek dan dirancang untuk menguatkan upaya pencapaian kompetensi dan karakter sesuai profil pelajar Pancasila yang disusun berdasar Standar Kompetensi Lulusan serta dalam pelaksanaannya dilakukan secara fleksibel dari segi muatan, kegiatan, dan waktu pelaksanaan. Adapun pelajar pancasila merupakan pelajar yang memiliki pola pikir, bersikap dan berperilaku yang mencerminkan nilai-nilai kandungan pancasila serta menjunjung tinggi toleransi agar terjwujud persatuan dan kesatuan bangsa serta perdamaian dunia. Sedangkan Profil Pelajar *rahmatan lil alamin* adalah Profil Pelajar Pancasila di madrasah yang mewujudkan wawasan pemahaman, dan perilaku *taffaqahu fiddin* sebagaimana kompetensi keagamaan di madrasah. Pelajar Pancasila yang *rahmatan lil alamin* mengajak untuk memberikan kedamaian, kebahagiaan, dan keselamatan untuk sesama manusia serta semua makhluk Allah SWT.

⁴² Direktorat Jendral Pendidikan Islam Kementerian Agama Republik Indonesia, *Pedoman Implementasi Kurikulum Merdeka Pada Madrasah*, (Jakarta: 2022), h. 46-47

b. Pembelajaran di Madrasah

Proses pembelajaran di madrasah merupakan satu kesatuan yang saling terpadu yang meliputi beberapa tahap perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi sebagaimana proses pembelajaran di sekolah tetapi, terdapat beberapa point yang berbeda dari kegiatan pembelajaran di madrasah dan di sekolah, beberapa diantaranya adalah istilah yang digunakan untuk mata pelajaran pendidikan agama. Di sekolah mata pelajaran agama menggunakan istilah Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti sedangkan di Madrasah menggunakan istilah Pendidikan Agama, dimana pada mata pelajaran Pendidikan Agama didalamnya terdapat empat mata pelajaran yang meliputi mata pelajaran Fiqih, Al Qur'an Hadist, Akidah Akhlak, dan Sejarah Kebudayaan Islam.

1) Pelaksanaan pembelajaran

Dalam kurikulum merdeka di madrasah terdapat pola pembelajaran religius yakni menjadikan nilai-nilai akhlak dan pemahaman yang moderat sebagai inspirasi cara berpikir, bersikap dan bertindak pada proses pembelajaran di madrasah. Selain itu juga pembelajaran di madrasah menggunakan nilai-nilai keislaman sebagai pengikat pola hubungan pendidik dengan peserta didik.

2) Pembelajaran pada madrasah berasrama

Asrama madrasah sebagai bagian integral dalam proses pendidikan di madrasah yang harus dimaknai sebagai lingkungan yang berfungsi sebagai tempat pembentukan karakter, penanaman nilai-nilai moral keagamaan, kebangsaan, dan penguatan akademik.

3) Penilaian/ *assessment* di madrasah

Penilaian/ *assessment* merupakan proses pengumpulan dan pengolahan informasi untuk mengetahui kebutuhan belajar, perkembangan dan pencapaian hasil belajar peserta didik dengan pendidikan karakter Profil Pelajar Pancasila dan Profil Pelajar Rahmatan Lil'alamin.

Selain itu pada penerapan kurikulum merdeka di madrasah dengan capaian pembelajaran yang ditetapkan pemerintah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan memberi ruang kreasi dan inovasi pada pengembangan kurikulum operasional di madrasah.

D. Problematika Implementasi Kurikulum Merdeka

Pada proses penerapan kurikulum merdeka tentunya akan ada permasalahan atau problematika yang terjadi, terlebih kurikulum merdeka merupakan kurikulum yang baru saja diterapkan. Dalam pembelajaran dengan kurikulum merdeka sendiri lebih difokuskan pada materi esensial dan pengembangan kompetensi peserta didik sesuai dengan fasenya. Sehingga pembelajaran lebih relevan dan interaktif melalui kegiatan-kegiatan seperti kegiatan proyek untuk memberi peluang peserta didik lebih aktif dan eksploratif dengan isu-isu aktual, selain itu juga dengan pengembangan kompetensi Profil Pelajar Pancasila, adapun tujuan dari kegiatan tersebut adalah untuk memperkuat literasi dan numerasi peserta didik serta pengetahuan pada setiap mata pelajaran.

Terdapat fase atau perkembangan pada setiap tingkat yang mana hal tersebut ditentukan dengan Capaian Pembelajaran (CP) yang harus dicapai oleh

peserta didik dengan disesuaikan melalui karakteristik, potensi, dan kebutuhan peserta didik dimana sudah tidak ada lagi kriteria penilain minimal dan cukup dengan menekankan kualitas belajar peserta didik sebagai Sumber Daya Manusia (SDM). Maka dalam proses penerapan kurikulum merdeka tentu menimbulkan problematika mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian.⁴³

Berdasarkan penjelasan singkat diatas, maka problematika dalam pengimplementasian kurikulum merdeka secara umum terjadi, diantaranya:

1. Pada tahap perencanaan

Tahap perencanaan merupakan tahap sebelum melaksanakan proses pembelajaran, dalam hal ini pendidik banyak mengalami kendala saat menyusun ATP (Alur Tujuan Pembelajaran), CP (Capaian Pembelajaran), TP (Tujuan Pembelajaran) dan Modul Ajar. Hal tersebut terjadi sebab pendidik masih belum benar-benar memahami tahap perencanaan pada kurikulum merdeka dan kesulitan dalam memanfaatkan teknologi, seain itu pendidik juga masih kesulitan dalam menentukan metode atau pendekatan yang akan digunakan dalam pembelajaran.⁴⁴

2. Pada tahap pelaksanaan

Tahap pelaksanaan adalah Tahap Kegiatan Belajar Mengajar (KBM), dalam hal ini problematika yang biasa terjadi dalam penerapan kurikulum merdeka adalah pendidik masih belum bisa menetapkan kegiatan belajar sesuai dengan minat belajar peserta didik, pendidik juga masih

⁴³ Rahmadayanti, Hartoyo, "Potret Kurikulum Merdeka, Wujud Merdeka Belajar di Sekolah Dasar", *Jurnal Basicedu*, Vol. 6, No. 6, (2022), hlm. 717-7187

⁴⁴ Siti Zulaiha, Tika Meldina, Meisin, "Problematika Guru dalam Menerapkan Kurikulum Merdeka", *Jurnal Pendidikan dan Pembelajaran Dasar*, Vol. 9, No. 2, (2022), hlm. 172.

belum memetakan kebutuhan belajar peserta didik sesuai dengan minatnya, selian itu juga peserta didik masih cenderung pasif dalam pembelajaran dan pendidik masih belum terbiasa untuk menciptakan kesempatan belajar bagi peserta didik untuk lebih aktif dalam proses pembelajaran.⁴⁵

3. Pada tahap evaluasi/ *assessment*

Tahan penilaian merupakan tahap untuk mengetahui kemajuan hasil belajar peserta didik dan mengetahui gaya belajar peserta didik, sehingga *assessment* perlu dilakukan. Pada kurikulum merdeka terdapat beberapa penilaian yang harus dilakukan seperti penilaian summatif dan formatif, dalam hal ini peserta sering masih cenderung hanya berfokus pada *assessment* formatif dan dijadikan sebagai acuan penilaian kepada peserta didik untuk laporan hasil belajar peserta didik. Sehingga problematika yang sering terjadi pada penerapan kurikulum merdeka ditahap evaluasi atau penilaian adalah pendidik masih belum melakukan penilaian sepenuhnya sesuai dengan tahap penilaian pada kurikulum merdeka. Pendidik masih lebih berfokus pada penilaian formatif daripada penilaian summatif untuk dijadikan hasil penilaian akhir peserta didik.⁴⁶

E. Mata Pelajaran Agama

1. Pengertian Mata Pelajaran

Menurut Mulyasa berpendapat bahwa mata pelajaran merupakan sesuatu yang mengandung pesan pembelajaran baik berupa khusus maupun

⁴⁵ Faridatul Jannah, Thooriq Irtifa' Fathuddin, Putri Fatimattus Az Zahra, "Problematika Penerapan Kurikulum Merdeka Belajar 2022", *Jurnal Al Yaizdy: Ilmu Sosial, Humoniora, Dan Pendidikan*, Vol. 4, No. 2, (2022), hlm. 61

⁴⁶ Farid Qomaruddin, "Problematika Implementasi Kurikulum Merdeka dalam Mata Pelajaran Bahasa Arab di MA Nasyi'in Sidoarjo", *Jurnal Of Applied Linguistics and Islamic Education*, Vol. 6, No. 2, (2022), hlm. 263.

umum.⁴⁷ Mata pelajaran adalah seperangkat alat pembelajaran yang berisi materi pembelajaran untuk mencapai tujuan pembelajaran.

Menuru Iskandarwasid dan Dadang mengatakan bahwa mata pelajaran adalah seperangkat informasi yang diberikan kepada peserta didik untuk memperoleh pembelajaran yang menyenangkan. Maka, berdasarkan beberapa pendapat mengenai mata pelajaran adalah alat atau bahan yang digunakan sebagai pedoman guru dalam menyampaikan materi pembelajaran pada mata pelajaran fikih. Adapun mata pelajaran yang dimaksud pada penelitian ini adalah pelajaran agama yang meliputi Fikih, Al Qur'an Hadist, Akidah Akhlak, dan Sejarah Kebudayaan Islam yang mana dari kesemuanya adalah materi atau mata pelajaran yang diajarkan pada jenjang madrasah.

⁴⁷ Mulyasa, Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan, vol.1 (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2006), h. 30